

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 01 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius.

Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik parsipatoris. Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan di tingkat nasional dan daerah merupakan satu kesatuan rangkaian pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya Undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat.

Kebijakan daerah tidak lagi bersifat selalu menerima dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosio kultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Melalui otonomi daerah, pemerintahan Kabupaten Kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program - program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk berkreasi, sekaranglah saatnya pemerintah daerah menunjukkan kemampuannya.

Kemandirian daerah merupakan salah satu kriteria untuk melihat berhasil atau tidaknya salah satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Kemandirian daerah dapat diartikan sebagai seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, mengingat pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan biaya/investasi yang cukup besar.

Daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Kemandirian daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. (Halim, 2009).

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. (Halim, 2009). Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi, dimana hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Melalui otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan

dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004). Selain Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah juga memberikan Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 32 Tahun 2004).

Persoalan kemandirian keuangan pemerintah daerah ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik (*fiscal need*), sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak mencukupi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut berupa: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Kemandirian keuangan daerah Kota Tasikmalaya berada pada kriteria rendah, artinya pemerintah daerah Kota Tasikmalaya harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang paling penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan

daerah. Permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kota Tasikmalaya antara lain : ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, kurangnya usaha dan kemampuan Penerimaan Daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Penelitian yang penulis lakukan merujuk pada penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan penulis lakukan maka dibuat tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Sumber</b>
1. Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen PAD  Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen Belanja Modal	PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal EK&BI Volume 3 No 2 Desember 2020  E-ISSN: 2621-4695 ISSN: 2620-7443
2. Tri Utari Handayani dan Erinis (2020) “Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum	Variabel Independen Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen Belanja Daerah	Pendapatan asli daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh belanja modal	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Volume 2 No 1 Seri C Februari 2020  ISSN : 2656-3649

ekonomi sebagai Variabel Moderating”					
3.	Wike Nurliza Arpani dan Halmawati (2020) dengan judul “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah  Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen Dana Perimbangan  Variabel Dependen Belanja Modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Volume 2 No 1 Seri D Februari 2020  ISSN : 2656-3649
4.	Nareswati Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum serta Belanja Modal terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah  Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen Belanja Modal	Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Journal Accounting and Finance Volume 2 No 1 Maret 2018  E-ISSN : 2581-1088

5. Nurafini Kustianingsing, Muslimin, dan Abdul Kahar (2018) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum  Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah  Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah  Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah	Katalogis Volume 6 No 6 Juni 2018  ISSN : 2302-2019
6. Krest D Tolosong (2018) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah  Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah  Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 Tahun 2018
7. Afifah Fauziah Amalia N, Haryanto (2019) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen PAD, DAU  Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.  Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap	Jurnal Of Accounting Volume 8 No 2 Tahun 2019  ISSN : 2337-3806
8. Ni Kadek Novia Indrawati Putri, Ni Putu Ayu Darmayanti (2019)	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen Dana Perimbangan  Variabel	Pendapatan asli daerah menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja	E-Jurnal Manajemen Volume 8 No 5 Tahun 2019 : 2834-

	“Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan”	Dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	keuangan Dana perimbangan menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan	2861 ISSN : 2302-8912
9.	Anak Agung Istri Agung Swandewi (2014) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat”	Variabel Independen Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah  Variabel Dependen Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat	Dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pengaruh positif terhadap keserasian anggaran  Kemandiriaan keuangan daerah, dana perimbangan, dan keserasian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.7 (2014) :356-376 ISSN : 2337-3067
10.	Afrizal Tahar & Maulida Zakhiya (2011), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi Daerah  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume 12 No 1 Januari 2011
11.	Wimpi Priambudi (2017) dengan judul “Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Variabel Dependen Belanja Modal  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Nominal Volume VI No 1 Tahun 2017

12. Anita Lestari, Nasrullah Dali, Muntu Abdullah (2016) dengan judul “Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah	Variabel Dependen Alokasi Belanja Modal	Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal  Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 2, 2016 e-ISSN : 2502-5171
	Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah		Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	
			Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	
			Belanja modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah	
13. Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen Dana Alokasi Khusus	DAU berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah, PAD berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah	E-Jurnal Manajemen Unud, Volume 7 No 3 Tahun 2018: 1255-1281
		Variabel Dependen Belanja Daerah		ISSN : 2302-8912

14. Rihfenti Ernayani (2017) “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen PAD dan DAU	Variabel Independen DAK dan dana bagi hasil	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah  Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah	Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume 1 No 1  ISSN : 2580-5398
15. Nyoman Trisna Erawati dan Leny Suzan (2015) dengan judul “Pengaruh PAD terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen PAD	Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil pengujian secara simultan variabel pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	e-Proceeding of Management : Volume 2 No 3 Desember 2015  ISSN : 2355-9357
16. Asyhari Rosidin dan Ecwin Hendra Saputra (2020) dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi	pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah bersama-sama	Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

	Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Kemandirian Keuangan Daerah		
17.	Ni Putu Gina Sukma Antari, dan Ida Bagus Panji Sedana (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen Belanja Modal  Variabel Dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  E-Jurnal Manajemen Unud, Volume7 No 2 Tahun 2018  ISSN : 2302-8912
18.	Renny Nur'ainy Desfitriana Rooswhan Budi Utomo (2013) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah  Variabel dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen pertumbuhan ekonomi	Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah  Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)  Volume 5 Oktober 2013  ISSN: 1858-2559
19.	Nina Andriana (2020). “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah”.		Variabel independen Dana Perimbangan dan Belanja Modal  Variabel Dependen Kemandirian Daerah	Belanja Modal tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. Secara simultan Dana Perimbangan dan Belanja Modal mempengaruhi kemandirian daera  Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume 2, No 1, Hal.105-113

---

20. R. Neneng Rina Andriani, Nisa Noor Wahid (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah  Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen Dana Perimbangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jurnal Akuntansi Volume 13 nomor 1 Januari-Juni 2018 30-39
--	---	--------------------------------------	---	--

---

Dede Siti Solihat (2016) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya).

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah,  $X_2$  = Dana Alokasi Umum,  $Y$  = Kemandirian Keuangan Daerah

---

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pernyataan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya
2. Bagaimana Pengaruh secara parsial dan Simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Kemandirian Keuangan Daerah Pada pemerintah Kota Tasikmalaya
2. Pengaruh secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebsgsi berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap kajian yang diteliti baik dari teori maupun praktek terhadap permasalahan yang dibahas yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan atau digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

3. Bagi Pihak Lain



